

# D-8, ASEAN, dan G20: Panggung Baru Diplomasi Indonesia di Tengah Pergeseran Global



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: D-8, ASEAN, dan G20: Panggung Baru*  
*Diplomasi Indonesia di Tengah Pergeseran Global*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Guru Besar Manajemen NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan  
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

---

© RudyCT Academic Series

[rudyct75@gmail.com](mailto:rudyct75@gmail.com)

14 Maret 2026

## **D-8, ASEAN, DAN G20: PANGGUNG BARU**

### **DIPLOMASI INDONESIA DI TENGAH PERGESERAN**

### **GLOBAL**

#### **1. Pendahuluan**

Diplomasi Indonesia hari ini tidak lagi dapat dibaca hanya melalui satu arena tunggal. Dunia sedang bergerak ke arah yang lebih cair, lebih kompetitif, dan lebih berlapis: rivalitas kekuatan besar meningkat, perdagangan semakin dipolitisasi, rantai pasok direstrukturisasi, isu energi dan pangan kembali menjadi strategis, dan negara-negara Global South menuntut ruang lebih besar dalam tata kelola dunia. Dalam konteks seperti ini, Indonesia membutuhkan diplomasi yang bekerja di beberapa lingkaran sekaligus. D-8, ASEAN, dan G20 dapat dibaca sebagai tiga panggung yang mewakili tiga lapisan berbeda dari kepentingan Indonesia: solidaritas ekonomi Selatan-Selatan, jangkar kawasan, dan pengaruh global. Kerangka resmi Kementerian Luar Negeri 2025–2029 sendiri menegaskan bahwa diplomasi Indonesia diarahkan untuk menjaga kedaulatan, memperkuat diplomasi ekonomi, dan meningkatkan kepemimpinan Indonesia di kawasan maupun dunia.

[\(Kemlu\)](#)

Dalam arti itu, D-8, ASEAN, dan G20 bukan sekadar daftar keanggotaan organisasi internasional. Ketiganya adalah instrumen yang berbeda fungsi. D-8 memberi ruang bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi di antara negara-negara berkembang berpenduduk besar, dengan kedekatan historis, demografis, dan dalam beberapa hal

juga kultural. ASEAN adalah lingkaran primer yang menjaga lingkungan strategis terdekat Indonesia, terutama di tengah tekanan Indo-Pasifik dan sentralitas kawasan. G20, sebaliknya, memberi Indonesia panggung untuk ikut membentuk agenda ekonomi global, reformasi keuangan internasional, transisi energi, dan pembangunan yang lebih inklusif. Karena itu, masa depan diplomasi Indonesia tidak terletak pada memilih salah satu forum, melainkan pada kemampuannya mensinergikan ketiganya. ([D-8 Organization](#))

Esai ini berargumen bahwa di tengah pergeseran global, Indonesia semakin membutuhkan diplomasi berlapis. D-8 penting untuk memperluas solidaritas dan jejaring ekonomi Selatan-Selatan. ASEAN tetap vital sebagai fondasi kestabilan kawasan dan instrumen utama untuk mencegah Indonesia terseret terlalu jauh ke logika blok. G20 memberikan saluran untuk memperjuangkan agenda yang lebih luas: reformasi pembiayaan, ketahanan pangan, transisi energi, dan posisi negara berkembang dalam tata kelola global. Namun peluang ini juga disertai tantangan: tumpang tindih agenda, keterbatasan kapasitas institusional, fragmentasi geoekonomi, dan risiko bahwa Indonesia aktif di banyak forum tetapi kurang menghasilkan terobosan yang konkret. ([Kemlu](#))

## **2. Dunia yang Bergeser dan Kebutuhan akan Diplomasi Berlapis**

Pergeseran global dewasa ini ditandai oleh dua gejala besar. Pertama, pusat-pusat kekuatan dunia menjadi lebih tersebar. Kedua, batas antara ekonomi dan geopolitik semakin kabur. Dalam lingkungan seperti ini, negara seperti Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan hubungan bilateral dengan kekuatan besar. Indonesia membutuhkan forum yang berbeda untuk fungsi yang berbeda: forum kawasan untuk stabilitas dekat, forum Selatan-Selatan untuk solidaritas dan diversifikasi, dan forum global untuk memengaruhi aturan yang lebih luas. Itulah sebabnya pendekatan diplomasi "multi-forum" menjadi semakin penting

bagi Indonesia. Renstra Kemlu 2025–2029 menempatkan secara eksplisit peningkatan pengaruh Indonesia sebagai *positive force* dan *bridge-builder* di kawasan dan dunia sebagai salah satu tujuan strategis utama. ([Kemlu](#))

Kebutuhan akan diplomasi berlapis ini juga muncul karena setiap forum memiliki basis legitimasi yang berbeda. D-8 memberi Indonesia ruang untuk bicara dalam bahasa kerja sama ekonomi negara berkembang. ASEAN memberi legitimasi regional dan kedekatan geografis. G20 memberi akses pada pengambilan keputusan ekonomi global yang tak dimiliki forum lain. Dalam praktiknya, keberhasilan diplomasi Indonesia bukan ditentukan oleh keanggotaan formal semata, tetapi oleh kemampuannya menggunakan perbedaan fungsi itu secara strategis. Bila tidak, Indonesia berisiko aktif di banyak forum tetapi tetap reaktif terhadap perubahan dunia. ([D-8 Organization](#))

### **3. D-8: Solidaritas Selatan-Selatan dan Ekonomi Negara Berkembang**

D-8 Organization for Economic Cooperation didirikan melalui Istanbul Declaration pada 15 Juni 1997, dan menurut situs resmi D-8 kini terdiri dari Azerbaijan, Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Türkiye; Azerbaijan resmi bergabung pada 2025. Ini berarti D-8 telah berkembang dari delapan menjadi sembilan anggota, yang semuanya adalah negara berkembang dengan ukuran populasi besar dan ambisi memperkuat kerja sama ekonomi. Bagi Indonesia, D-8 memberi panggung yang berbeda dari ASEAN atau G20: forum ini lebih longgar, lebih politis dalam solidaritas Selatan-Selatan, dan lebih terbuka bagi agenda seperti perdagangan intra-D-8, UMKM, pemuda, pariwisata, kesehatan, dan isu-isu solidaritas politik tertentu. ([D-8 Organization](#))

KTT D-8 ke-11 di Kairo pada 19 Desember 2024 memberi gambaran yang cukup jelas tentang arah organisasi ini. Cairo Declaration 2024 menegaskan kembali komitmen pada multilateralisme, implementasi *D-8*

*Decennial Roadmap 2020–2030*, dan penguatan kerja sama ekonomi antaranggota. Deklarasi itu juga mengangkat tema yang sangat penting, yaitu **“Investing in Youth and Supporting SMEs: Shaping Tomorrow’s Economy.”** Penekanan pada pemuda dan UMKM menunjukkan bahwa D-8 berusaha menempatkan dirinya bukan semata sebagai forum negara, tetapi juga sebagai wadah penguatan basis ekonomi domestik anggota-anggotanya. Bagi Indonesia, tema seperti ini relevan karena sejalan dengan kebutuhan memperkuat kewirausahaan, ekonomi digital, dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha skala kecil-menengah. ([D-8 Organization](#))

Perkembangan sepanjang 2025 memperlihatkan bahwa D-8 tidak berhenti pada deklarasi puncak. Laporan resmi organisasi menunjukkan berlangsungnya Sesi Komisi ke-49 pada Mei 2025, aktivitas lanjutan pada perdagangan, dan penguatan agenda sektoral seperti kesehatan. Pada Desember 2025, D-8 bahkan mengadopsi Joint Cairo Ministerial Declaration on Health Cooperation Framework, yang menegaskan bahwa organisasi ini sedang mencoba memperluas dirinya dari forum ekonomi umum menuju kerja sama sektoral yang lebih konkret. Ini penting bagi Indonesia karena forum seperti D-8 berpotensi menjadi saluran untuk memperluas pengaruh di bidang yang lebih spesifik dan pragmatis, terutama ketika hubungan ekonomi global semakin dipenuhi kompetisi dan proteksionisme. ([D-8 Organization](#))

Di sisi lain, D-8 juga memiliki dimensi politik yang tidak bisa diabaikan. Kementerian Luar Negeri RI pada Maret 2025 secara khusus mencatat bahwa D-8 juga memberi perhatian pada situasi Palestina, dan bahwa rangkaian KTT ke-11 di Kairo berlangsung dalam konteks tersebut. Ini menunjukkan bahwa D-8 bagi Indonesia bukan hanya saluran ekonomi, tetapi juga ruang solidaritas politik di antara negara-negara berkembang tertentu. Dalam konteks diplomasi Indonesia, ini berguna karena memberi saluran tambahan untuk menyuarakan isu-isu keadilan internasional di luar forum Barat-sentris. Namun di sinilah pula

keterbatasannya: D-8 belum memiliki bobot institusional, keuangan, dan pasar sebesar ASEAN atau G20. Maka, forum ini lebih tepat dibaca sebagai arena penguatan jaringan dan solidaritas daripada arena yang sendirian dapat mengubah struktur ekonomi global. ([Kemlu](#))

#### 4. Nilai Strategis D-8 bagi Indonesia

Meski skalanya lebih kecil, D-8 tetap penting bagi Indonesia karena setidaknya tiga alasan. Pertama, forum ini memungkinkan Indonesia memperkuat **diplomasi ekonomi Selatan-Selatan** di luar skema yang terlalu didominasi negara maju. Kedua, D-8 dapat menjadi ruang yang lebih fleksibel untuk mendorong agenda praktis seperti perdagangan intra-organisasi, UMKM, pariwisata, kesehatan, dan pemuda. Ketiga, D-8 memberi Indonesia legitimasi tambahan sebagai negara berkembang besar yang tidak hanya aktif di forum global besar, tetapi juga di forum yang lebih dekat dengan kebutuhan negara-negara berkembang lain. Cairo Declaration dan aktivitas 2025 menunjukkan bahwa organisasi ini terus berupaya membangun kerja sama yang lebih operasional. ([D-8 Organization](#))

Namun, D-8 juga memiliki keterbatasan yang nyata. Perdagangan intra-D-8 belum menandingi potensi pasarnya, dan institusionalisasinya masih jauh lebih lemah dibanding ASEAN maupun G20. Karena itu, D-8 sebaiknya dibaca bukan sebagai pengganti dua forum lain, tetapi sebagai **lapisan tambahan** yang memungkinkan Indonesia memperluas pengaruh dan pilihan. Secara strategis, D-8 berguna justru karena dunia sedang bergerak ke arah diversifikasi poros. Dalam dunia yang makin terfragmentasi, memiliki lebih banyak panggung dengan logika berbeda adalah keuntungan diplomatik. ([Kemlu](#))

#### 5. ASEAN: Jangkar Kawasan dan Benteng Sentralitas

Jika D-8 adalah lingkaran solidaritas ekonomi negara berkembang, maka ASEAN adalah lingkaran paling dekat dan paling vital bagi Indonesia. *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* menegaskan bahwa kawasan Indo-

Pasifik harus dipandang sebagai ruang dialog dan kerja sama, bukan persaingan, dengan *ASEAN Centrality* sebagai prinsip dasar. Pada 2025, ASEAN melangkah lebih jauh melalui *ASEAN 2045: Our Shared Future* dan *ASEAN Community Vision 2045*, yang menempatkan ASEAN sebagai kawasan yang tangguh, inovatif, dinamis, dan people-centred, sekaligus menjaga sentralitasnya di tengah perubahan global. Bagi Indonesia, ini sangat penting karena ASEAN adalah pagar pertama yang mencegah Asia Tenggara menjadi sekadar arena tarik-menarik kekuatan besar. ([ASEAN](#))

Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI 2025 secara eksplisit menegaskan bahwa ASEAN tetap sangat penting bagi Indonesia, dan bahwa Indonesia akan terus mengedepankan persatuan dan sentralitas ASEAN. Pernyataan ini tidak bersifat seremonial. Dalam praktiknya, Indonesia terus menempatkan ASEAN sebagai kerangka utama untuk menghadapi isu Laut Cina Selatan, arsitektur Indo-Pasifik, konektivitas ekonomi, dan penguatan posisi Asia Tenggara di tengah rivalitas global. Ketika sentralitas ASEAN melemah, ruang gerak Indonesia ikut menyempit; ketika ASEAN kuat, Indonesia memiliki ruang manuver yang lebih luas. ([Kemlu](#))

Posisi itu dipertegas kembali dalam AIPF 2025 di Kuala Lumpur. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa penyelenggaraan ASEAN-Indo-Pacific Forum 2025 mempertegas kepemimpinan Indonesia dalam menjaga relevansi AOIP di tengah dinamika geopolitik, dan menegaskan ASEAN sebagai poros kolaborasi Indo-Pasifik. Ini penting, karena ASEAN bagi Indonesia bukan sekadar forum pertemuan rutin, tetapi instrumen untuk memastikan bahwa Indo-Pasifik tidak sepenuhnya didefinisikan oleh strategi negara-negara besar di luar Asia Tenggara. Dengan kata lain, ASEAN adalah alat Indonesia untuk mempertahankan **kawasan yang tidak dikunci satu blok**. ([Kemlu](#))

## 6. Mengapa ASEAN Tetap Menjadi Arena Utama

Ada beberapa alasan mengapa ASEAN tetap menjadi panggung utama diplomasi Indonesia. Pertama, ASEAN adalah forum yang paling dekat dengan kepentingan keamanan Indonesia, terutama terkait laut, perbatasan, migrasi, dan stabilitas kawasan. Kedua, ASEAN merupakan pintu bagi diplomasi ekonomi regional, termasuk konektivitas, perdagangan, dan investasi. Ketiga, ASEAN memberi Indonesia legitimasi regional untuk berbicara di panggung yang lebih besar, termasuk Indo-Pasifik dan forum global. Dokumen *ASEAN 2045* menegaskan bahwa kawasan ingin memperkuat hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dengan mitra eksternal sambil tetap menjaga sentralitas ASEAN. Ini berarti ASEAN tidak memandang dirinya terpisah dari ekonomi global, tetapi ingin masuk ke dalamnya dengan posisi kolektif yang lebih kuat. ([ASEAN](#))

Bagi Indonesia, ASEAN juga penting karena ia memungkinkan diplomasi yang lebih berlapis: Indonesia dapat memadukan kepentingan nasional dengan kepentingan regional. Dalam konteks G20, BRICS, atau negosiasi global lain, Indonesia sering lebih kuat ketika ia dapat berbicara sebagai bagian dari kawasan yang relatif terorganisasi. Itulah sebabnya banyak kajian diplomasi Indonesia menekankan perlunya menjahit kepentingan nasional dan kepentingan ASEAN, bukan mempertentangkannya. Dalam dunia yang semakin multipolar, forum kawasan seperti ASEAN justru menjadi lebih penting, bukan kurang penting. ([Jurnal Hubungan Luar Negeri](#))

Namun ASEAN juga menghadapi tekanan besar. Minilateralisme keamanan, rivalitas AS-Tiongkok, isu Laut Cina Selatan, dan perbedaan kepentingan internal antaranggota membuat sentralitas ASEAN tidak pernah otomatis. Bahkan dokumen-dokumen ASEAN 2045 sendiri mengakui perlunya memperkuat kapasitas institusional, kecepatan pengambilan keputusan, dan koordinasi lintas sektor. Bagi Indonesia, ini berarti satu hal: mempertahankan sentralitas ASEAN membutuhkan

investasi diplomatik yang jauh lebih serius daripada sekadar menyerukan "ASEAN centrality." ([ASEAN](#))

## 7. G20: Panggung Global untuk Agenda Indonesia

Jika D-8 adalah forum solidaritas ekonomi negara berkembang dan ASEAN adalah jangkar regional, maka G20 adalah panggung global tempat Indonesia dapat berbicara tentang struktur ekonomi dunia. G20 tetap penting karena menghimpun ekonomi-ekonomi utama dunia dan karena keputusan, diskusi, atau arah kebijakannya memengaruhi keuangan, perdagangan, energi, pangan, utang, dan reformasi lembaga internasional. Di bawah Presidensi Afrika Selatan tahun 2025, G20 mengusung tema besar **solidarity, equality, and sustainable development**, dengan empat prioritas utama: **strengthening disaster resilience and response; ensuring debt sustainability for low-income countries; mobilising finance for a just energy transition; and harnessing critical minerals for inclusive growth and sustainable development**. Agenda ini sangat dekat dengan kepentingan Indonesia. ([G20](#))

Penting untuk dicatat bahwa KTT G20 Johannesburg 2025 adalah **KTT G20 pertama yang diselenggarakan di benua Afrika**. Leaders' Declaration menegaskan bahwa para pemimpin berkumpul di Johannesburg pada 22–23 November 2025 untuk membahas tantangan global utama dengan solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan sebagai pilar pertumbuhan inklusif. Dalam deklarasi yang sama, isu food security, reformasi pembiayaan pembangunan, dukungan pada *Global Alliance Against Hunger and Poverty*, dan isu debt sustainability mendapat tempat penting. Bagi Indonesia, ini berarti G20 2025 semakin bergerak ke agenda yang relevan bagi Global South, bukan hanya stabilitas makro negara maju. ([DIRCO](#))

Bagi diplomasi Indonesia, G20 memberi tiga keuntungan besar. Pertama, forum ini memberi akses langsung pada diskusi mengenai **reformasi**

**arsitektur keuangan internasional**, termasuk utang dan pembiayaan pembangunan. Kedua, G20 menjadi arena penting untuk mendorong agenda **transisi energi yang adil**, sesuatu yang sangat relevan bagi Indonesia sebagai negara energi, negara berkembang, sekaligus negara dengan agenda hilirisasi dan mineral kritis. Ketiga, G20 memberi Indonesia panggung untuk menegaskan dirinya sebagai negara berkembang besar yang dapat menjadi penghubung antara kepentingan Utara dan Selatan. Ini sejalan dengan posisi resmi Kemlu yang menempatkan Indonesia sebagai *bridge-builder* dan *positive force*. (G20)

## 8. G20 dan Peluang Baru bagi Indonesia

Agenda G20 di bawah Afrika Selatan 2025 secara substantif membuka peluang yang cukup besar bagi Indonesia. Prioritas utang, pembiayaan transisi energi, dan critical minerals misalnya, sangat dekat dengan kebutuhan Indonesia untuk memperjuangkan pembiayaan pembangunan yang lebih adil, menekan biaya modal, dan memperkuat posisinya dalam ekonomi hijau. Laman resmi G20 South Africa bahkan menempatkan *critical minerals* sebagai salah satu dari empat prioritas kepresidenan. Bagi Indonesia, yang sedang membangun politik hilirisasi nikel dan mineral lain, ini adalah pintu penting untuk mengangkat isu nilai tambah, industrialisasi, dan posisi negara penghasil mineral dalam rantai pasok global. (G20)

Selain itu, penekanan G20 South Africa pada debt sustainability juga sangat relevan. Banyak negara berkembang menghadapi biaya pinjaman tinggi dan ruang fiskal sempit. Indonesia memang relatif lebih kuat daripada banyak negara berpendapatan rendah, tetapi kepentingannya tetap jelas: reformasi pembiayaan global yang lebih inklusif akan menguntungkan negara-negara berkembang secara lebih luas, termasuk dalam pembiayaan iklim, infrastruktur, dan industrialisasi. Karena itu, G20 memberi Indonesia ruang untuk mendorong agenda yang bermanfaat

bagi dirinya sendiri sekaligus konsisten dengan identitasnya sebagai bagian dari Global South. ([DIRCO](#))

Namun, G20 juga memiliki keterbatasan. Forum ini lebih besar, lebih kompleks, dan lebih terikat pada kompromi kekuatan besar dibanding D-8 atau bahkan ASEAN. Pengaruh Indonesia di G20 tidak bersifat otomatis, meskipun Indonesia pernah memegang presidensi pada 2022. Untuk tetap relevan, Indonesia harus datang dengan gagasan, koalisi, dan tindak lanjut domestik yang kuat. Tanpa itu, G20 hanya menjadi panggung retorik. Justru karena G20 lebih berat secara politik, Indonesia perlu memanfaatkan D-8 dan ASEAN sebagai basis dukungan moral dan kawasan untuk memperkuat posisinya di forum global ini. ([DIRCO](#))

### **9. Tiga Panggung, Tiga Fungsi, Satu Kepentingan Nasional**

Jika dibaca secara bersama, D-8, ASEAN, dan G20 tidak saling meniadakan. Ketiganya justru menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia kini berjalan dalam **tiga lingkaran**. Lingkaran pertama adalah D-8, yang berguna untuk memperkuat jejaring ekonomi, solidaritas, dan isu-isu Selatan-Selatan. Lingkaran kedua adalah ASEAN, yang menjadi fondasi stabilitas dan sentralitas kawasan. Lingkaran ketiga adalah G20, yang memberi jalur untuk memengaruhi ekonomi global dan reformasi tata kelola internasional. Bila Indonesia dapat memadukan ketiganya, maka ia memperoleh diplomasi yang sekaligus punya kedalaman regional, keluasan global, dan jejaring alternatif di antara negara berkembang. ([D-8 Organization](#))

Dalam praktiknya, sinergi ini penting karena isu-isu utama sekarang memang melintasi skala yang berbeda. Ketahanan pangan, misalnya, bisa dibahas di G20 sebagai isu global, di ASEAN sebagai isu kawasan, dan di D-8 sebagai isu kerja sama negara berkembang. Hal yang sama berlaku untuk UMKM, digitalisasi, transisi energi, critical minerals, dan reformasi pembiayaan. Artinya, kekuatan diplomasi Indonesia terletak bukan pada forum mana yang "paling penting," tetapi pada

kemampuannya menghubungkan agenda yang sama di beberapa forum yang berbeda. Inilah yang bisa disebut sebagai **multi-layered diplomacy**. ([D-8 Organization](#))

## 10. Tantangan bagi Diplomasi Indonesia

Meskipun peluangnya besar, diplomasi berlapis seperti ini menghadapi tantangan nyata. Pertama, ada risiko **dispersi kapasitas**: Indonesia aktif di banyak forum tetapi sumber daya diplomatik, koordinasi antarkementerian, dan tindak lanjut kebijakannya terbatas. Renstra Kemlu sendiri mengakui keterbatasan anggaran dan kompleksitas agenda yang makin besar. Kedua, ada risiko **inkonsistensi naratif** bila posisi Indonesia di satu forum tidak cukup nyambung dengan posisi di forum lain. Ketiga, ada risiko bahwa Indonesia terlalu menekankan simbol kehadiran, tetapi kurang menghasilkan deliverables yang terukur. ([Kemlu](#))

Tantangan lain adalah perubahan global yang sangat cepat. D-8 harus berjuang agar tetap relevan di tengah banyaknya forum lain. ASEAN harus mempertahankan sentralitas di tengah minilateralisme dan rivalitas kekuatan besar. G20 sendiri harus menghadapi fragmentasi geopolitik dan melemahnya kepercayaan pada multilateralisme. Artinya, Indonesia tidak hanya harus pandai memainkan forum-forum ini, tetapi juga harus membantu menjaga agar forum-forum tersebut tetap relevan. Ini adalah beban sekaligus peluang bagi negara menengah seperti Indonesia. ([D-8 Organization](#))

## 11. Arah Strategis Indonesia ke Depan

Agar D-8, ASEAN, dan G20 benar-benar menjadi panggung baru diplomasi Indonesia, ada beberapa arah strategis yang tampak penting. Pertama, Indonesia perlu membangun **agenda lintas-forum** yang lebih jelas. Misalnya, isu UMKM dan ekonomi digital bisa didorong di D-8, dipererat dengan konektivitas regional ASEAN, lalu diangkat dalam kerangka pembiayaan dan inklusi di G20. Kedua, Indonesia perlu

memperkuat **kapasitas institusional dan analitis** agar setiap partisipasi forum menghasilkan tindak lanjut domestik yang nyata. Ketiga, Indonesia perlu terus menempatkan dirinya sebagai *bridge-builder*, tetapi dengan orientasi yang lebih konkret: membangun koalisi isu, bukan hanya menjaga keseimbangan retorik. ([D-8 Organization](#))

Keempat, Indonesia perlu memastikan bahwa keaktifan di forum global tetap terhubung dengan kepentingan nasional yang paling nyata: perdagangan, investasi, pembiayaan pembangunan, transisi energi, ketahanan pangan, dan posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Inilah yang membuat forum-forum internasional benar-benar relevan bagi pembangunan nasional. Tanpa penghubung semacam itu, diplomasi akan tampak aktif, tetapi manfaatnya sulit dirasakan. Sebaliknya, bila keterhubungan itu kuat, maka D-8, ASEAN, dan G20 bisa menjadi alat yang saling memperkuat. ([G20](#))

## 12. Penutup

D-8, ASEAN, dan G20 memperlihatkan bahwa diplomasi Indonesia sedang bergerak ke arah yang semakin berlapis. D-8 penting sebagai panggung solidaritas ekonomi Selatan-Selatan dan jejaring alternatif di antara negara berkembang. ASEAN tetap tak tergantikan sebagai jangkar kawasan, benteng sentralitas, dan instrumen utama untuk menjaga agar Indonesia tidak kehilangan ruang manuver di Indo-Pasifik. G20 menjadi panggung global untuk memperjuangkan reformasi pembiayaan, ketahanan pangan, transisi energi yang adil, dan posisi negara berkembang dalam tata kelola dunia. Masing-masing forum memiliki keterbatasan, tetapi justru karena itu ketiganya perlu dibaca sebagai saling melengkapi. ([D-8 Organization](#))

Dalam dunia yang sedang bergeser, keunggulan Indonesia tidak terletak pada kemampuan mendominasi salah satu forum, melainkan pada kemampuannya **menjahit tiga panggung ini menjadi satu strategi diplomatik yang koheren**. Bila berhasil, Indonesia tidak hanya akan

hadir di berbagai meja perundingan, tetapi juga mampu menghubungkan solidaritas Selatan-Selatan, stabilitas kawasan, dan reformasi global ke dalam satu agenda nasional yang kuat. Dengan begitu, D-8, ASEAN, dan G20 bukan hanya arena kehadiran Indonesia, melainkan benar-benar menjadi panggung baru bagi diplomasi Indonesia di abad ke-21. ([Kemlu](#))

Berikut **Glosarium** dan **Daftar Pustaka (APA 7)** untuk topik “**D-8, ASEAN, dan G20: Panggung Baru Diplomasi Indonesia di Tengah Pergeseran Global.**”

## **Glosarium**

### **1. D-8 (Developing-8 Organization for Economic Cooperation)**

Forum kerja sama ekonomi negara-negara berkembang yang didirikan pada 1997. Per akhir 2024–2025, D-8 berkembang dari delapan menjadi sembilan anggota setelah proses aksesinya Azerbaijan disetujui. ([D-8 Organization](#))

### **2. Kerja sama Selatan–Selatan (South–South Cooperation)**

Pola kerja sama antarnegara berkembang untuk memperkuat perdagangan, investasi, pembangunan kapasitas, dan solidaritas politik tanpa terlalu bergantung pada pusat kekuatan tradisional. Semangat ini tampak kuat dalam dokumen dan agenda D-8. ([D-8 Organization](#))

### **3. ASEAN Centrality**

Prinsip bahwa ASEAN harus tetap menjadi pusat arsitektur kawasan dan forum utama dialog serta kerja sama di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.

AOIP dan dokumen ASEAN 2024–2025 menegaskan prinsip ini secara eksplisit. ([ASEAN](#))

#### **4. AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)**

Dokumen ASEAN 2019 yang memandang Indo-Pasifik sebagai kawasan dialog dan kerja sama, bukan rivalitas, dengan ASEAN-led mechanisms sebagai fondasi utamanya. ([ASEAN](#))

#### **5. AIPF (ASEAN-Indo-Pacific Forum)**

Forum yang mendorong implementasi konkret AOIP melalui proyek kolaborasi ekonomi, konektivitas, energi, dan kerja sama strategis lain. Indonesia pada 2025 menegaskan AIPF sebagai instrumen menjaga relevansi AOIP. ([Kemlu](#))

#### **6. ASEAN 2045: Our Shared Future**

Dokumen visi jangka panjang ASEAN yang menempatkan kawasan sebagai komunitas yang tangguh, inovatif, dinamis, dan people-centred, serta memperkuat sentralitas ASEAN di tengah pergeseran global. ([ASEAN](#))

#### **7. ASEAN-centred regional architecture**

Susunan forum, norma, dan mekanisme kawasan yang menempatkan ASEAN sebagai poros utama kerja sama regional. Deklarasi para pemimpin ASEAN tahun 2024 menegaskan pentingnya arsitektur kawasan yang tetap ASEAN-centred, terbuka, inklusif, dan berbasis aturan. ([ASEAN](#))

#### **8. G20**

Forum yang menghimpun ekonomi-ekonomi utama dunia untuk membahas stabilitas ekonomi global, keuangan, pembangunan, energi, perdagangan, dan isu lintas-sektor lainnya. Dalam concept note Presidensi Afrika Selatan, G20 disebut mewakili sekitar 85% PDB global, 75% perdagangan internasional, dan dua pertiga populasi dunia. ([G20](#))

## **9. Presidensi G20 Afrika Selatan 2025**

Kepemimpinan G20 oleh Afrika Selatan dari 1 Desember 2024 sampai 30 November 2025, dengan prioritas pada solidaritas, kesetaraan, pembangunan berkelanjutan, utang, transisi energi yang adil, dan mineral kritis. ([G20](#))

## **10. Sherpa Track**

Jalur negosiasi dan koordinasi substantif dalam G20 yang menyiapkan agenda non-keuangan bagi para pemimpin. Dalam konteks G20 2025, banyak prioritas substantif seperti ketahanan bencana, energi, dan pembangunan dibahas melalui jalur ini. ([G20](#))

## **11. Just Energy Transition**

Transisi energi yang tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, pembiayaan, akses, dan dampaknya bagi negara berkembang. Ini menjadi salah satu prioritas utama G20 Afrika Selatan 2025. ([G20](#))

## **12. Debt sustainability**

Kemampuan suatu negara menjaga tingkat utang yang tetap dapat dikelola tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan pembangunan. Isu ini menjadi salah satu prioritas sentral G20 2025, terutama bagi negara-negara berpendapatan rendah. ([G20](#))

## **13. Critical minerals**

Mineral strategis yang penting bagi transisi energi, manufaktur maju, dan teknologi modern. Presidensi G20 Afrika Selatan menempatkan pemanfaatan critical minerals untuk pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas. ([G20](#))

## **14. Multilateralisme**

Pendekatan kerja sama internasional yang bertumpu pada aturan, lembaga, dan forum bersama, bukan semata hubungan bilateral atau

politik blok. D-8, ASEAN, dan G20 semuanya—dengan cara berbeda—mengafirmasi pentingnya multilateralisme. ([D-8 Organization](#))

### **15. Bridge-builder**

Peran diplomatik sebagai penghubung antara kepentingan, kawasan, atau kelompok negara yang berbeda. Dalam Renstra Kemlu 2025–2029, Indonesia diposisikan untuk memperkuat pengaruhnya sebagai positive force dan bridge-builder. ([Kemlu](#))

### **Daftar Pustaka (APA 7)**

Association of Southeast Asian Nations. (2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. ASEAN Secretariat. ([ASEAN](#))

Association of Southeast Asian Nations. (2024). *ASEAN Leaders' Declaration on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific for the future-ready ASEAN and ASEAN-centred regional architecture*. ASEAN Secretariat. ([ASEAN](#))

Association of Southeast Asian Nations. (2025). *ASEAN 2045: Our shared future*. ASEAN Secretariat. ([ASEAN](#))

Association of Southeast Asian Nations. (2025). *ASEAN Community Vision 2045: Resilient, innovative, dynamic and people-centred ASEAN*. ASEAN Secretariat. ([ASEAN](#))

D-8 Organization for Economic Cooperation. (n.d.). *Brief history of D-8*. Retrieved March 14, 2026. ([D-8 Organization](#))

D-8 Organization for Economic Cooperation. (2024, December 19). *Cairo Declaration 2024*. ([D-8 Organization](#))

D-8 Organization for Economic Cooperation. (2025). *Report of the 49th Session of the D-8 Commission*. ([D-8 Organization](#))

D-8 Organization for Economic Cooperation. (2025, December 1). *Joint Cairo Ministerial Declaration on Health Cooperation Framework*. ([D-8 Organization](#))

Government of South Africa, G20 Presidency. (2025). *G20 South Africa Presidency concept note and calendar*. ([G20](#))

Government of South Africa, G20 Presidency. (n.d.). *High-level deliverables*. Retrieved March 14, 2026. ([G20](#))

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2025–2029*. ([Kemlu](#))

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025, November 14). *Indonesia tegaskan ASEAN sebagai poros kolaborasi Indo-Pasifik melalui ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) 2025 di Kuala Lumpur*. ([Kemlu](#))

Republic of South Africa, Department of International Relations and Cooperation. (2025, November 22–23). *G20 South Africa Summit: Leaders' Declaration*. ([DIRCO](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 14 Maret 2026  
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69acf5b9-8798-839d-83f0-cffa92d7b98c>